

## ABSTRAK / ABSTRACT

Sebagai bagian dari instansi pemerintah, UPBU Lasondre tidak terlepas dari kewajiban penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan Anjab dan ABK sebagaimana peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, salah satu unsur penting efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi tidak semata ditentukan bentuk struktur birokrasi, melainkan beban kerja yang harus dianalisis. Sehingga, jika dilaksanakan sesuai ketentuan, maka semestinya ketersediaan PNS di UPBU Lasondre tercukupi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor penyebab masalah tersebut. Peneliti menggunakan metode studi pustaka dan wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan, kemudian menganalisis data tersebut dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) sebagian besar penyusunan kebutuhan pegawai di sana masih belum direncanakan dengan baik; (2) penentuan rencana pengadaan kekurangan pegawai bukan merupakan kewenangan unit tersebut; dan (3) penyusunan kebutuhan pegawai tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal penggunaan format penyusunan kebutuhan. Karena itu disarankan (1) unit yang membawahi UPBU Lasondre dapat melimpahkan kewenangan penentuan rencana jumlah pengadaan pegawai kepada UPBU Lasondre; (2) penyusunan kebutuhan pegawai hendaknya direncanakan dengan baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku; (3) memberikan pelatihan teknis penyusunan kebutuhan pegawai kepada petugas yang diberi tanggung jawab sebagai pengelola data kebutuhan pegawai; (4) proses penyusunan kebutuhan pegawai hendaknya dapat memanfaatkan teknologi sistem informasi yang terintegrasi.

**Kata kunci:** Penyusunan Kebutuhan PNS, UPBU Lasondre

*As part of a government agency, UPBU Lasondre is inseparable from the obligation to prepare the needs for the number and types of civil servant positions based on Anjab and ABK as stipulated in the legislation. Theoretically, one of the important elements of the effectiveness and efficiency of organizational performance is not solely determined by the form of the bureaucratic structure, but the workload that must be analyzed. Thus, if implemented in accordance with the provisions, the availability of civil servants at UPBU Lasondre should be sufficient. The purpose of this study is to identify the factors causing the problem. Researchers used literature study and interview methods to obtain the necessary data, then analyzed the data with a descriptive approach. The results showed (1) most of the preparation of employee needs there was still not well planned; (2) the determination of the procurement plan for employee shortages was not the authority of the unit; and (3) the preparation of employee needs did not pay attention to applicable regulations, especially in terms of using the format for preparing needs. Therefore, it is recommended that (1) the unit in charge of UPBU Lasondre can delegate the authority to determine the plan for the number of employee procurement to UPBU Lasondre; (2) the preparation of employee needs should be well planned and follow applicable regulations; (3) provide technical training on the preparation of employee needs to officers who are given the responsibility of managing employee needs data; (4) the process of preparing employee needs should be able to utilize integrated information system technology.*

**Key words:** Preparation of civil servant needs, Lasondre UPBU